



Analisis Model Kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia

Mohammad Rafatta Umar¹, Charren Galuh Indraswari², Dwi Desky Setiawan³,
Reivania Calista⁴, Fatkhuri⁵

¹⁻⁵ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,
Indonesia

2310413082@mahasiswa.upnvj.ac.id¹; 2310413083@mahasiswa.upnvj.ac.id²;

2310413115@mahasiswa.upnvj.ac.id³; 2310413041@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴; fatkhuri@upnvj.ac.id⁵

Korespondensi penulis: 2310413082@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. Education is important for the lives of people in a country. In order to create an educational system that is organized and has a vision, a policy in the form of a curriculum is needed. In a country that adheres to a democratic system, it is necessary to involve or participate the community in the policy formulation and implementation process. This policy paper investigates the Merdeka Curriculum policy model created and implemented by the Ministry of Education and Culture. Public policy models include top-down, bottom-up and a combination of the two. The research method used in this article is qualitative with data sources obtained from books, scientific articles, and other credible information found on the internet. In the policy formulation process, studies were conducted and the government involved parents. In addition, in the implementation process, the Merdeka Curriculum is carried out in stages with a trial period carried out by several schools called Mover Schools. In addition, the policy also has an evaluation instrument in the form of a Minimum Competency Assessment. Based on the findings related to this policy, it can be concluded that the policy model in the Merdeka Curriculum is bottom-up.

Keywords: Policy Model, Independent Curriculum, Indonesia

Abstrak. Pendidikan adalah hal yang penting bagi kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Pada rangka membuat sistem pendidikan yang tertata dan memiliki visi, maka diperlukan sebuah kebijakan berupa kurikulum. Di negara yang menganut sistem demokrasi, maka perlu pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses formulasi serta implementasi kebijakan. Policy paper ini menyoediki model kebijakan Kurikulum Merdeka yang dibuat dan diimplementasi oleh Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. Model kebijakan publik antara lain adalah top-down, bottom-up dan gabungan di antara keduanya. Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah kualitatif dengan sumber data yang didapat dari buku, artikel ilmiah, dan informasi-informasi kredibel lainnya yang ditemukan di internet. Pada proses formulasi kebijakan, kajian-kajian dilakukan dan pemerintah melibatkan orang tua siswa. Selain itu, pada proses implementasi, Kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap dengan masa uji coba yang dilakukan oleh beberapa sekolah yang disebut sebagai Sekolah Penggerak. Selain itu, kebijakan tersebut juga memiliki instrumen evaluasi berupa Asesmen Kompetensi Minimum. Berdasarkan temuan-temuan terkait kebijakan ini, dapat disimpulkan model kebijakan pada Kurikulum Merdeka adalah bottom-up.

Kata kunci: Model Kebijakan, Kurikulum Merdeka, Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam pembangunan dan kemajuan suatu negara. Melalui pendidikan, sebuah negara dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing global (Tilaar, 2012). Sejarah mencatat bahwa negara-negara maju di dunia umumnya memiliki sistem pendidikan yang kuat, berkualitas, dan berkelanjutan (Sowell, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam bidang pendidikan merupakan kunci penting bagi sebuah negara untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.

Kurikulum merupakan komponen krusial dalam sistem pendidikan. Kurikulum menentukan arah, isi, dan proses pembelajaran yang akan dilalui oleh peserta didik (Hamalik, 2018). Oleh karena itu, penyusunan kurikulum harus dilakukan dengan cermat, komprehensif, dan berkelanjutan agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pembangunan nasional (Mulyasa, 2017).

Kurikulum yang baik akan mampu membekali peserta didik dengan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Indonesia sebagai negara dengan dinamika politik dan sosial yang cukup tinggi, telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum sejak masa kemerdekaan (Hidayat, 2019). Perubahan kurikulum ini dilatarbelakangi oleh upaya penyesuaian dengan perkembangan zaman, tuntutan globalisasi, serta kebutuhan pembangunan nasional (Sanjaya, 2015). Namun, seringkali pergantian kurikulum tidak dibarengi dengan evaluasi dan analisis yang mendalam, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam implementasinya di lapangan (Wibowo & Suyanto, 2018). Perubahan kurikulum yang terlalu cepat dan tidak terencana dengan baik dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pendidik dan peserta didik, serta mengganggu kontinuitas proses pembelajaran. Maskur (2023) menyebutkan bahwa pergantian kurikulum yang terjadi di Indonesia, khususnya pada tingkat sekolah dasar menghasilkan dampak negatif, yaitu tidak berhasilnya target yang telah pada awal penerapan yang disebabkan ketidakmampuan guru-guru dalam memahami kurikulum baru dan tidak mendukungnya fasilitas sekolah pada beberapa daerah untuk pengimplementasian kurikulum.

Saat ini, Indonesia sedang menerapkan Kurikulum Merdeka yang merupakan pengembangan dari Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2020). Kurikulum Merdeka hadir sebagai upaya memberikan lebih banyak keleluasaan dan otonomi bagi satuan pendidikan dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik lokal (Dewantara et al., 2021). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, implementasi Kurikulum Merdeka juga tidak lepas dari tantangan dan permasalahan, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan regulasi yang mendukung.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kurikulum merdeka berfokus kepada pembahasan implementasi kebijakan tersebut. Yunita et al., (2023) dalam jurnalnya yang berjudul "Implementasi Kurikulum Merdeka" mengambil studi kasus pada Pesantren Jami'atul Qurro' Palembang di mana mereka menemukan bahwa implementasi kurikulum tersebut pada tempat itu terdiri dari tiga tahap, yaitu perencanaan yang berupa penentuan rancangan kurikulum serta partisipasi pada workshop mengenai kurikulum, implementasi berupa

pelaksanaan yang mana mereka menemukan adanya kendala berupa terlalu dininya implementasi tersebut sementara tempat tersebut masih menggunakan Kurikulum 2013. Barlian et al., (2022) dalam sebuah artikel berjudul “Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” mengambil studi kasus implementasi kurikulum tersebut pada SDN 244 Guruminda Kota Bandung yang menemukan bahwa panduan pembuatan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka digunakan oleh SDN 244 Guruminda Kota Bandung untuk membuat perangkat pembelajaran yang mana panduan tersebut mencakup analisis capaian pembelajaran (CP) untuk menentukan tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran, perencanaan asesmen diagnostik, pembuatan modul ajar yang menyesuaikan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik, dan perencanaan asesmen formatif, dan pada tahap implementasi dimulai dengan tes diagnostik, menggunakan modul ajar berbasis proyek, yang mengatur pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, dan menerapkan tes formatif dan sumatif.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang terkait dengan Kurikulum Merdeka dengan fokus pembahasan model kebijakan pada kebijakan. Model kebijakan perlu diketahui untuk menilai apakah kebijakan tersebut dilakukan secara demokratis dalam arti melibatkan partisipasi publik atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis model kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia dengan mengingat juga urgensi penguatan sistem pendidikan nasional demi mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan global (Nuh, 2015). Analisis mendalam terhadap model kebijakan Kurikulum Merdeka mencoba memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia, khususnya pada tahap formulasi serta implementasi, yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Jika ditinjau secara etimologis, pendidikan berakar dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogie* yang tersusun dari kata *paes* yang bermakna anak dan *agogos* yang bermakna membimbing (Turmuzi, 2021). Berdasarkan uraian etimologis tersebut, pendidikan bermakna bimbingan yang ditujukan kepada anak. Uraian etimologis yang berbeda dapat ditemukan dari bahasa Romawi (Turmuzi, 2021). Pendidikan pada bahasa tersebut berasal dari kata *educate* yang bermakna mengeluarkan sesuatu dari dalam. Menurut ahli Zaharai Idris, pendidikan merupakan berbagai rangkaian aktivitas komunikasi antara orang dewasa dan anak didik, baik secara langsung maupun melalui media, untuk membantu perkembangan anak

seutuhnya(Rahman et al., 2022). Definisi pendidikan lain juga dapat ditemukan dari teks hukum di Indonesia, yaitu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai rangka mengembangkan pendidikan secara nasional, maka diperlukanlah sebuah sistem kurikulum untuk menata apa-apa saja yang harus diajarkan kepada peserta didik. Zainuri (2018) menjelaskan dalam bukunya, “Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan” bahwa kurikulum dapat diartikan dalam tiga konteks yang berbeda, yaitu sebagai beberapa mata pelajaran yang harus dilalui oleh peserta didik, sebagai pengalaman dalam belajar, dan rencana program belajar peserta didik. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa kurikulum diformulasi serta dikembangkan untuk mempersiapkan agar peserta didik siap untuk menjani hidup di masyarakat. Kesiapan tersebut memiliki makna mampu berkomunikasi, menerima norma, dan pengalaman yang dapat digunakan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan minat dan bakatnya.

Umumnya, pemerintah membentuk kurikulum sebagai suatu kebijakan melalui kementerian pendidikan. Pada pemerintahan yang menganut demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam memformulasikan dan mengimplementasikan suatu kebijakan(Nurhidayat, 2023). Penekanan partisipasi masyarakat dalam konteks tersebut akan memperkuat nilai demokrasi dan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan masyarakat dan responsif.

Pada studi kebijakan publik terdapat berbagai model kebijakan yang dilihat dari proses formulasi serta implementasinya. Model yang pertama adalah *top-down* yang mana kebijakan dirancang dan diputuskan oleh otoritas pusat seperti pemerintah pusat, yang kemudian didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah untuk diimplementasikan. Keberhasilan model ini diukur dari desain kebijakan dan kontrol yang ketat dari pembuat kebijakan. Menurut Sabatier dan Mazmanian (1980), model *top-down* dapat diterapkan secara tepat untuk perintah kebijakan yang membutuhkan kejelasan, seperti keamanan nasional atau masalah ekonomi yang sangat regulatif. Namun, model ini dikritik karena kurang memperhatikan dinamika lokal dan masukan dari masyarakat (Smith & Larimer, 2017). Sebaliknya, model *bottom-up* memulai evolusi kebijakan dengan pelibatan masyarakat, dimulai dengan aktor lokal dan masyarakat sebagai partisipan aktif dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, hasil

kebijakan menurut Elmore (1979) merupakan hasil interaksi antara berbagai aktor yang memiliki pandangan, kebutuhan, dan pengalaman berbeda. Model ini cukup fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan kebutuhan yang ada di daerah, tetapi dianggap kurang optimal jika ada kebutuhan untuk koordinasi nasional (Hill & Hupe, 2014).

Konsep serta teori tersebut akan digunakan untuk memahami dan menjadi pisau analisis dalam policy paper ini. Konsep mengenai pendidikan dan kurikulum membantu memahami konsep kebijakan Kurikulum Merdeka. Teori mengenai model kebijakan top-up dan bottom-up akan digunakan untuk menganalisis dan mengklasifikasi apakah status Kurikulum Merdeka di antara dua model tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan pendidikan. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan metode yang tepat untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Dalam konteks penelitian tentang Kurikulum Merdeka, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam kompleksitas implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen resmi, jurnal akademik, buku referensi, dan publikasi terkait kebijakan pendidikan. Sumber data primer berasal dari dokumen resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum Merdeka, sedangkan sumber data sekunder mencakup publikasi ilmiah, artikel penelitian, dan kajian akademik yang membahas tentang kurikulum pendidikan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi Kebijakan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pendidikan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) pada tahun 2022, dengan tujuan utama untuk memberikan ruang lebih besar bagi kebebasan belajar dan kreativitas dalam pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini berfokus pada pemenuhan kompetensi peserta didik, pengembangan karakter, serta pemetaan kebutuhan dunia nyata yang relevan dengan perkembangan zaman. Menurut kepala BSKAP Anindito Aditomo (2024) “Pengembangan Kurikulum Merdeka dilakukan sejak awal 2020 dan diterapkan secara terbatas di sekitar 3.000 Sekolah Penggerak pada 2021. Pada tahap

berikutnya, yaitu tahun 2022 dan 2023, Kurikulum Merdeka menjadi opsi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan. Pada tahap tersebut, lebih dari 300 ribu satuan pendidikan secara sukarela memilih untuk mulai menerapkan Kurikulum Merdeka. Ini mencakup sekitar 80% dari satuan pendidikan formal di Indonesia”.

Sebelum kebijakan ini diimplementasikan, banyak kajian dan penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dari kebijakan sebelumnya, keterlibatan pendidik dan praktis pendidikan juga dilibatkan menjadi bagian dari pembuatan kebijakan Kurikulum Merdeka ini dalam beberapa kesempatan para pendidik memberikan umpan balik terkait ide dan konsep yang diusulkan, pastinya tetap dari pertimbangan pemerintah. Selain pertukaran ide dan konsep dengan aktor pendidik, pemerintah juga membuka dialog dengan masyarakat termasuk orang tua siswa. Kebijakan ini juga menjadi jawaban atas krisisnya pembelajaran pada saat Covid-19 terjadi di Indonesia.

Proses Implementasi Kurikulum Pendidikan Dari Masa Percobaan

Implementasi Kurikulum Merdeka selain menjalankan program sekolah penggerak sebagai pendorong paradigma pembelajaran baru juga bertujuan untuk mendukung tujuan pendidikan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat karakter siswa, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global, memberikan kebebasan dalam kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi pengembangan potensi diri peserta didik. Utamanya bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan menjalankan arahan kementerian. Penentuan dan penetapan tujuan dilakukan dengan rapat. Penentuan tujuan tersebut melibatkan tim pengembang kurikulum yang melaksanakan workshop serta mempertimbangkan dan melibatkan berbagai pihak seperti komite, peserta didik, dan orang tua (L. Saajidah, 2018). Dan selama uji coba Kurikulum Merdeka, banyak guru yang merasa lebih leluasa dalam merancang metode pembelajaran, terutama pembelajaran berbasis proyek, yang memungkinkan siswa menghubungkan teori dengan praktik sehari-hari.

Proses implementasi Kurikulum Merdeka melibatkan beberapa fase penting. Dalam menyusun rencana pembelajaran berbasis kompetensi, guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kompetensi yang harus dicapai oleh siswa serta merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Rencana pembelajaran tersebut harus mencakup berbagai metode yang menarik dan relevan. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung partisipasi aktif siswa melalui penerapan metode pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif. Pemanfaatan teknologi memiliki peran penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka, aplikasi dan platform digital digunakan untuk

mendukung proses pembelajaran, membuatnya lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Evaluasi yang berkelanjutan adalah bagian yang tak bisa terlewatkan dari proses pembelajaran. Guru melakukan evaluasi secara terus-menerus untuk memantau perkembangan siswa serta mengidentifikasi hal apa yang perlu diperbaiki. Bentuk evaluasi bisa berupa ujian tertulis sampai proyek berbasis keterampilan.

Namun, tidak sedikit tantangan yang ditemukan selama fase percobaan ini. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi guru, terutama di daerah terpencil. Beberapa guru mengaku merasa kebingungan dengan konsep baru ini, terutama terkait penerapan modul ajar dan asesmen berbasis proyek. Selain itu, disparitas infrastruktur pendidikan juga menjadi masalah. Di wilayah perkotaan, implementasi kurikulum cenderung lebih lancar karena fasilitas yang mendukung, sedangkan di daerah terpencil, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia menjadi hambatan yang signifikan.

Untuk berhasil menerapkan Kurikulum Merdeka mungkin ini merupakan titik pentingnya yang dimana Pengembangan profesional guru memang sangat . Guru perlu terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya dalam mengajar sesuai dengan pendekatan Kurikulum Merdeka. Pelatihan dan workshop secara rutin diadakan untuk memastikan guru siap menghadapi tantangan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.

Tahap Implementasi Kurikulum Pendidikan Di Semua Jenjang

Pada tahun 2024, Kurikulum Merdeka mulai diimplementasikan secara bertahap di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Dalam tahap ini, pemerintah memfasilitasi pelatihan bagi guru melalui platform daring seperti Merdeka Mengajar, yang menyediakan berbagai materi ajar, modul pelatihan, serta ruang berbagi pengalaman antar pendidik (Kemendikbudristek, 2022). Di sisi lain, buku panduan dan modul pembelajaran juga didistribusikan ke sekolah-sekolah untuk membantu guru dan siswa dalam memahami serta menerapkan kurikulum ini. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Tahap implementasi kurikulum pendidikan disemua jenjang, Kurikulum Merdeka melibatkan tahapan-tahapan yang sama di semua jenjang pendidikan, meski dengan penyesuaian yang tepat untuk setiap level. Asesmen diagnostik awal dilakukan pada awal tahun pembelajaran untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan untuk perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan.

Salah satu ciri khas dari Kurikulum Merdeka adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk mengembangkan keterampilan berpikir

kritis, kerja sama, dan kreativitas melalui proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa di jenjang pendidikan dasar dapat melakukan proyek sederhana tentang lingkungan, sedangkan di jenjang menengah, proyek dapat lebih kompleks, seperti menciptakan solusi untuk isu-isu sosial atau teknologi. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa memahami teori, tetapi juga membangun keterampilan praktis yang berguna untuk masa depan.

Meskipun demikian implementasi Kurikulum Merdeka bukan tanpa hambatan. Selain masalah infrastruktur, resistensi terhadap perubahan dari beberapa pihak juga menjadi tantangan. Sebagian guru dan orang tua masih merasa nyaman dengan metode pembelajaran tradisional yang berfokus pada penguasaan materi dan hasil ujian. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan semua pihak memahami manfaat jangka panjang dari kurikulum ini.

Pemerintah juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti efektivitas pembelajaran, keterlibatan siswa, dan dampak kurikulum terhadap hasil belajar. Salah satu instrumen evaluasi yang digunakan adalah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), *“AKM merupakan langkah untuk memerdekakan peserta didik, adapun kemerdekaan yang dimaksud adalah bebasnya peserta didik dari diskriminasi sistemik yang berdampak pada pembelajaran. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut penggunaan AKM masih harus disempurnakan. Perlengkapan fasilitas dan pelatihan guru untuk pelaksanaan AKM juga harus diberikan sesegera mungkin”* (Tju, M., & Murniarti, E. 2021).

Melalui tahapan dan evaluasi yang seharusnya menjadi konsen pemerintah, implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia dapat mencapai tujuan pengembangan karakter, keterampilan, dan kreativitas siswa, serta meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dengan dilihat dari formulasi dan implementasi kebijakannya, kebijakan ini merupakan model *bottom up* karena melibatkan partisipasi dari aktor pendidikan dan orang tua murid dan disertakan dengan evaluasi berkala pada tahap uji coba di berbagai sekolah yang dituju.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kurikulum Merdeka merupakan terobosan kebijakan pendidikan Indonesia yang mencerminkan komitmen untuk mentransformasi sistem pendidikan secara menyeluruh..

Kebijakan ini tidak sekadar mengubah struktur kurikulum, melainkan juga menghadirkan filosofi baru dalam proses pembelajaran yang memberi ruang lebih luas bagi kreativitas, pengembangan karakter, dan keterampilan praktis peserta didik.

Perjalanan implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan proses yang cermat dan bertahap. Dimulai pada tahun 2021 dengan program Sekolah Penggerak, kebijakan ini secara sistematis melibatkan para pendidik, orangtua, dan pemangku kepentingan dalam setiap tahap perumusan dan pengembangan. Fase uji coba memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi tantangan, menerima masukan, dan melakukan penyesuaian sebelum implementasi nasional, yang menandakan komitmen terhadap pendekatan partisipatif dan responsif. Berdasarkan pelibatan masyarakat, evaluasi yang ada, dalam proses formulasi dan implementasi yang tidak terburu-buru, maka dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka terklasifikasi pada mode bottom-up.

Kendati demikian, perjalanan implementasi Kurikulum Merdeka tidak terlepas dari berbagai tantangan. Disparitas infrastruktur antar wilayah, keterbatasan pelatihan guru di daerah terpencil, serta resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan signifikan yang memerlukan perhatian serius. Perbedaan kesiapan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam mengadopsi metode pembelajaran baru menuntut strategi yang komprehensif dan sensitif terhadap keberagaman konteks pendidikan di Indonesia.

Evaluasi berkelanjutan melalui instrumen seperti Asesmen Kompetensi Minimum akan menjadi fondasi penting dalam penyempurnaan kurikulum. Dengan pendekatan yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti, Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk mentransformasi pendidikan Indonesia. Tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi yang tidak sekadar memiliki pengetahuan akademis, melainkan juga memiliki karakter kuat, keterampilan praktis, dan kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global.

Saran

Untuk mewujudkan visi Kurikulum Merdeka, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pengembangan profesional guru, pemerataan infrastruktur, dan sosialisasi yang intensif. Pelatihan berkala, platform digital yang mendukung, serta mekanisme umpan balik yang responsif menjadi kunci keberhasilan. Penting untuk membangun pemahaman mendalam di kalangan pendidik dan masyarakat tentang filosofi di balik pendekatan berbasis proyek dan pengembangan kompetensi holistik.

Evaluasi berkelanjutan melalui instrumen seperti Asesmen Kompetensi Minimum akan menjadi fondasi penting dalam penyempurnaan kurikulum. Selain itu, terdapat evaluasi yang

dilakukan dengan melakukan dialog secara rutin antar pembangku kebijakan pendidikan dengan tenaga pendidik dan peserta didik di berbagai daerah di mana kurikulum itu telah diterapkan. Setiap daerah tentu memiliki tantangannya masing-masing, mulai dari fasilitas sampai kualitas tenaga pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum. Melalui dialog rutin tersebut, pemangku kebijakan pendidikan dapat memberikan responst dan evaluasi yang tepat. Keberhasilan Kurikulum Merdeka akan sangat tergantung pada komitmen bersama antara pemerintah, pendidik, orangtua, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Dengan kolaborasi, keterbukaan terhadap perubahan, dan fokus pada pengembangan potensi setiap peserta didik, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan bermakna. Dengan pendekatan yang adaptif, responsif, dan berbasis bukti, Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk mentransformasi pendidikan Indonesia. Tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi yang tidak sekadar memiliki pengetahuan akademis, melainkan juga memiliki karakter kuat, keterampilan praktis, dan kemampuan berpikir kritis yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global.

6. DAFTAR REFERENSI

- Amanulloh, M. J. F. A., & Wasila, N. F. W. (2024). Implementasi dan pengembangan kurikulum merdeka dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1), 33-58.
- Barlian, U. C., Solekah, S., & Rahayu, P. (2022). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. *Journal of Educational and Language Research*, 10(1), 105–117. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dewantara, J. A., Efriani, Suastika, N., & Suryana, A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Memperkuat Karakter di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 9-20.
- Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. *Political Science Quarterly*, 94(4), 601-616. <https://doi.org/10.2307/2149628>
- Hamalik, O. (2018). *Kurikulum dan pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Hidayat, R. (2019). *Pengantar sosiologi kurikulum*. Rajawali Pers.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). SAGE.
- Kemendikbudristek (2022). Tahapan Implementasi Kurikukulum Merdeka di Satuan Pendidikan. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Tahapan-Implementasi-Kurikulum-Merdeka.pdf>
- Kemendikbud. (2020). *Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- L. Saajidah 2018 Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan KurikulumMadrassa *Journal of Islamic Educational Management* 1(2), pp. 16–22
- MASKUR, M. (2023). Dampak Pergantian Kurikulum Pendidikan Terhadap Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 1(3), 190–203. <https://doi.org/10.61116/jkip.v1i3.172>
- Media Scanter. (2024, April 1). Langkah-langkah Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah. <https://mediascanter.id/langkah-langkah-implementasi-kurikulum-merdeka-di-sekolah/>
- Mulyasa, E. (2017). Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013. Remaja Rosdakarya.
- Nuh, M. (2015). Pengembangan kurikulum 2013. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurhidayat, I. (2023). *PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. 1*, 40–52.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Sanjaya, W. (2015). Kurikulum dan pembelajaran: Teori dan praktik pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Kencana.
- Smith, K. B., & Larimer, C. W. (2017). *The public policy theory primer* (3rd ed.). Routledge.
- Sowell, E. J. (2015). Curriculum: An integrative introduction (4th ed.). Pearson Education, Inc.
- Tilaar, H. A. R. (2012). Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia. Rineka Cipta.
- Tju, M., & Murniarti, E. (2021). ANALISIS PELATIHAN ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 14(2), 110–116. <https://doi.org/10.51212/jdp.v14i2.7>
- Turmuzi, M. (2021). Konsep Pendidikan dan Islam Sebagai Alternatif dalam Memanusiakan Manusia. *AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan Islam*, 19(2), 261–282.
- Wibowo, U. B., & Suyanto. (2018). Evaluasi kurikulum dan pembelajaran. UNY Press.
- Yunita, Zainuri, A., Ibrahim, Zulfi, A., & Mulyadi. (2023). Implementasi kurikulum merdeka belajar. *Jambura Journal of Educational Management*, 13(1), 16–25. <https://doi.org/10.35335/lebah.v13i2.63>
- Zainuri, A. (2018). *Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan*. NoerFikri.